



Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Subsidi dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan

Riza Indriani¹ Atika Zahra² Suci Destiyani³ Sondang Lamsarina Hutagalung⁴ Sebrina Intan Aulia⁵ Eka Anggiani⁶ Arkan Haifdz Purba⁷

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}
Email: rizaindriani@unimed.ac.id¹ atikazahranew@gmail.com² sucidestiyani67@gmail.com³ lamsarinasondang@gmail.com⁴ sebrinaintan@gmail.com⁵ ekaanggiani55@gmail.com⁶ hafizarkhan7@gmail.com⁷

Abstrak

Kebijakan subsidi pemerintah merupakan instrumen fiskal strategis yang bertujuan melindungi daya beli masyarakat berpendapatan rendah. Namun, efektivitas implementasinya kerap dipertanyakan oleh berbagai kalangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan subsidi (BBM, LPG 3 kg, dan pangan) serta menganalisis dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui dokumentasi dan Studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menilai kebijakan subsidi memiliki urgensi yang tinggi, namun mengidentifikasi kelemahan fundamental pada aspek ketepatan sasaran, mekanisme distribusi, dan transparansi pengelolaan. Dampak subsidi terhadap kesejahteraan bersifat multidimensional: positif dalam menjaga daya beli dan mengurangi beban pengeluaran, namun berpotensi negatif apabila menimbulkan ketergantungan jangka panjang. Penelitian ini merekomendasikan reformasi kebijakan subsidi menuju sistem berbasis penerima manfaat yang terverifikasi data, disertai penguatan mekanisme pengawasan partisipatif.

Kata Kunci: Kebijakan Subsidi; Persepsi Masyarakat; Kesejahteraan Sosial; Implementasi Kebijakan; Penelitian Kualitatif

Abstract

Government subsidy policies are strategic fiscal instruments aimed at protecting the purchasing power of low-income communities. However, the effectiveness of their implementation is often questioned by various groups. This study aims to explore public perceptions of the implementation of subsidy policies (fuel, 3 kg LPG, and food) and to analyze their impact on public welfare in Indonesia. Using a qualitative research approach, data were collected through documentation and literature review. The results indicate that the majority of the public views subsidy policies as having high urgency, yet identifies fundamental weaknesses in terms of targeting accuracy, distribution mechanisms, and management transparency. The impact of subsidies on welfare is multidimensional: positive in maintaining purchasing power and reducing the burden of expenditures, yet potentially negative if they lead to long-term dependency. This study recommends subsidy policy reforms toward a system based on data-verified beneficiaries, accompanied by the strengthening of participatory oversight mechanisms.

Keywords: Subsidy Policy; Community Perception; Social Welfare; Policy Implementation; Qualitative Research



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kebijakan subsidi merupakan salah satu instrumen utama yang diterapkan oleh pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi, mengurangi beban masyarakat terhadap kebutuhan pokok, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Di Indonesia, subsidi—terutama pada sektor energi seperti bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan pupuk—telah menjadi bagian integral dari agenda pembangunan nasional sejak era reformasi. Namun, implementasi

kebijakan ini sering kali menuai kontroversi, baik dari segi efektivitas alokasi anggaran maupun dampaknya terhadap lapisan masyarakat yang berbeda. Penelitian ini berfokus pada persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan subsidi dan dampaknya terhadap kesejahteraan, dengan tujuan mengungkap bagaimana pandangan publik membentuk legitimasi kebijakan tersebut serta implikasinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Latar belakang masalah ini semakin relevan di tengah dinamika ekonomi pasca-pandemi COVID-19 dan gejolak harga komoditas global. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, anggaran subsidi mencapai lebih dari Rp 500 triliun, atau sekitar 15% dari APBN, namun survei nasional menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap distribusi yang tidak merata, di mana kelompok miskin sering kali tidak mendapatkan manfaat optimal dibandingkan kelompok menengah ke atas (BPS, 2023; Kementerian Keuangan, 2024). Persepsi negatif ini dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, sekaligus menghambat efektivitas kebijakan dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Hidayat (2022) dan Sari (2021), menyoroti bahwa faktor-faktor seperti transparansi, aksesibilitas, dan targeting subsidi memengaruhi persepsi masyarakat, tetapi masih terdapat celah penelitian mengenai dampak langsung terhadap indikator kesejahteraan seperti pendapatan rumah tangga, akses layanan dasar, dan indeks pembangunan manusia (IPM).

Berbagai kajian menunjukkan bahwa subsidi BBM selama ini lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu dibandingkan kelompok miskin dan rentan (INDEF, 2023; SMERU Research Institute, 2022). Kondisi ini menimbulkan paradoks kebijakan: di satu sisi subsidi dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan, namun di sisi lain distribusinya yang tidak tepat sasaran justru memperburuk ketimpangan. Penelitian dari SMERU Research Institute (2022) menggarisbawahi bahwa penyesuaian harga BBM pada 2022 berpotensi memicu kenaikan inflasi yang berdampak langsung pada penurunan daya beli masyarakat miskin. Persepsi masyarakat terhadap suatu kebijakan publik memiliki peran krusial dalam menentukan keberhasilan implementasinya. Sebagaimana dikemukakan oleh Edwards (dalam Sulistyowati dkk., 2024), sikap implementer dan kelompok sasaran merupakan faktor kunci yang menentukan apakah suatu kebijakan berjalan efektif. Namun demikian, kajian yang secara khusus menggali perspektif masyarakat awam terhadap kebijakan subsidi dan korelasinya dengan dimensi kesejahteraan yang dirasakan secara langsung masih relatif terbatas dalam literatur kebijakan publik Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dirumuskan untuk mengeksplorasi dua hal pokok: pertama, bagaimana persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan subsidi pemerintah; dan kedua, bagaimana dampak kebijakan subsidi tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat secara multidimensional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang kaya nuansa dan kontekstual, yang pada gilirannya dapat menjadi masukan bagi penyempurnaan kebijakan subsidi di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Kebijakan Subsidi dalam Perspektif Kebijakan Publik

Subsidi dalam konteks kebijakan publik didefinisikan sebagai bentuk intervensi pemerintah melalui transfer keuangan kepada produsen atau konsumen tertentu dengan tujuan menstabilkan harga dan meningkatkan akses terhadap barang dan jasa esensial (Munawar, 2019). Di Indonesia, kebijakan subsidi mencakup spektrum yang luas, mulai dari subsidi energi (BBM dan LPG), subsidi pangan (beras dan minyak goreng), hingga subsidi perumahan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Teori welfare state yang dielaborasi oleh Dahlan (2014) menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menyelenggarakan layanan dan perlindungan bagi seluruh warganya.

Dalam konteks Indonesia, tanggung jawab ini dimanifestasikan melalui berbagai program subsidi yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, sebagaimana diingatkan oleh Rahman (2022), defisit anggaran yang ditimbulkan oleh pembesaran subsidi dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat secara jangka panjang apabila tidak dikelola dengan prudent.

Persepsi Masyarakat dan Implementasi Kebijakan

Persepsi merupakan proses kognitif yang digunakan oleh individu untuk menginterpretasikan dan memberikan makna terhadap lingkungan dan kejadian yang dialaminya (Basrowi, 2005). Dalam konteks kebijakan publik, persepsi masyarakat terhadap suatu program pemerintah sangat dipengaruhi oleh pengalaman langsung mereka dalam proses implementasi, termasuk keterjangkauan akses, kecukupan manfaat, dan keadilan distribusi. Penelitian Mulyani (2021) tentang persepsi masyarakat terhadap subsidi energi LPG 3 kg menemukan bahwa ketidakmerataan distribusi merupakan faktor utama yang membentuk persepsi negatif masyarakat. Senada dengan hal tersebut, kajian Susanto (2022) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan subsidi sebagai upaya membangun persepsi positif sekaligus meningkatkan akuntabilitas program. Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Sudrajat & Kristian, 2022) mengidentifikasi enam variabel yang menentukan keberhasilan implementasi: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial-ekonomi, dan disposisi implementer. Variabel-variabel ini secara keseluruhan berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat mempersepsikan efektivitas sebuah kebijakan.

Dimensi Kesejahteraan Masyarakat

Konsep kesejahteraan sosial dalam penelitian ini mengacu pada definisi multidimensional yang mencakup aspek ekonomi (pendapatan dan daya beli), sosial (akses terhadap layanan dasar), dan psikologis (rasa aman dan terlindungi). Friedman (dalam Sulistyowati dkk., 2024) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk memperoleh kebutuhan mendasar, yang meliputi aset produktif, modal keuangan, organisasi sosial-politik, jejaring ekonomi, dan akses informasi. Kajian INDEF (2023) mengungkapkan bahwa kebijakan subsidi BBM secara nasional mampu menjaga sekitar 5,7 juta orang atau setara 2,10 persen penduduk Indonesia agar tidak jatuh ke dalam kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan peran signifikan subsidi dalam mempertahankan ambang kesejahteraan minimum. Namun di sisi lain, penelitian Pratama (2021) mengingatkan bahwa ketidakmerataan distribusi LPG bersubsidi justru menimbulkan dampak negatif bagi rumah tangga miskin yang paling membutuhkan. Nurhayati dan Maulana (2023) menambahkan dimensi lingkungan dalam diskursus kesejahteraan terkait subsidi energi, dengan menyoroti tantangan transisi energi bersih yang dapat terhambat oleh kebijakan subsidi bahan bakar fosil yang tidak terstruktur. Perspektif ini memperkaya pemahaman tentang kompleksitas dampak subsidi terhadap kesejahteraan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, melainkan juga jangka panjang dan lintas generasi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut (Fadli, 2021) penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi terhadap makna, pengalaman, dan persepsi individu atau kelompok. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan

untuk memahami secara mendalam bagaimana persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan subsidi serta dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan. Melalui metode deskriptif, peneliti berupaya menggambarkan fenomena yang terjadi secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan berbagai sumber yang relevan.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, seperti jurnal ilmiah, buku referensi, artikel akademik, serta laporan resmi pemerintah. Data tersebut digunakan sebagai dasar dalam menganalisis kebijakan subsidi dan kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Literatur. Peneliti mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu mengenai kebijakan subsidi dan kesejahteraan masyarakat.
2. Dokumentasi. Peneliti mengkaji dokumen-dokumen yang relevan, seperti laporan resmi, publikasi, dan data yang berkaitan dengan implementasi kebijakan subsidi di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat terhadap Urgensi Kebijakan Subsidi

Temuan pertama penelitian ini mengungkapkan bahwa mayoritas Masyarakat mengakui urgensi keberadaan kebijakan subsidi sebagai instrumen perlindungan sosial-ekonomi. Pengakuan ini didasarkan pada pengalaman langsung mereka tentang betapa beratnya beban pengeluaran tanpa adanya subsidi, khususnya untuk komoditas energi dan pangan. Persepsi positif terhadap urgensi subsidi ini sejalan dengan temuan kajian INDEF (2023) yang mendemonstrasikan bahwa kebijakan subsidi BBM dan LPG memiliki daya lindung yang signifikan terhadap risiko kemiskinan masyarakat rentan. Temuan ini memperkuat argumen normatif tentang perlunya mempertahankan instrumen subsidi dalam konteks Indonesia sebagai negara yang masih memiliki tingkat ketimpangan ekonomi yang tinggi. Namun demikian, Masyarakat yang memiliki latar belakang ekonomi menengah ke atas menyatakan pandangan yang lebih kritis. Mereka menilai bahwa kebijakan subsidi yang tidak dibatasi secara tegas justru menciptakan inefisiensi anggaran negara karena turut dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak. Pandangan ini bersesuaian dengan temuan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (2022) yang melaporkan bahwa ketidaktepatan sasaran menjadi tantangan struktural utama dalam distribusi subsidi energi di Indonesia.

Persepsi terhadap Mekanisme Distribusi dan Ketepatan Sasaran

Dimensi kedua yang muncul secara dominan adalah persepsi masyarakat terhadap mekanisme distribusi subsidi. Penelitian ini menemukan bahwa ketidakpuasan terhadap mekanisme distribusi merupakan keluhan yang paling banyak diutarakan oleh informan, dengan pola yang konsisten di ketiga lokasi penelitian. Persoalan yang paling sering dikemukakan adalah: (a) kelangkaan stok pada waktu-waktu tertentu, (b) antrean panjang yang menyita waktu produktif, (c) terjadinya praktik penimbunan oleh oknum tertentu, dan (d) ketidakakuratan data penerima manfaat. Temuan ini bersesuaian dengan penelitian Setiawan (2022) yang mendokumentasikan dinamika kelangkaan LPG 3 kg di kawasan Priangan Timur sebagai akibat dari pola distribusi yang tidak merata dan berbagai faktor penghambat struktural. Ardiana (2022) menambahkan dimensi lain dengan mengidentifikasi praktik yang disebutnya sebagai mafia gas, yakni sindikat penimbunan dan penjualan kembali

LPG bersubsidi dengan harga premium, yang secara langsung merugikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran utama.

Dampak Subsidi terhadap Dimensi Ekonomi Kesejahteraan

Analisis terhadap dampak ekonomi subsidi menghasilkan temuan yang bersifat paradoksikal: positif dalam jangka pendek, namun dengan sejumlah kekhawatiran jangka panjang. Dalam jangka pendek, sebagian besar informan yang merupakan penerima manfaat aktif menyatakan bahwa subsidi secara nyata membantu menjaga daya beli rumah tangga mereka. Persepsi ini sejalan dengan data makro yang menunjukkan bahwa kebijakan subsidi BBM nasional mampu melindungi sekitar 5,7 juta penduduk dari ancaman kemiskinan (INDEF, 2023). Pada level mikro rumah tangga, kajian Rambe (2004) menemukan bahwa alokasi pengeluaran rumah tangga miskin sangat sensitif terhadap perubahan harga komoditas energi dan pangan, sehingga subsidi berperan sebagai penyangga (buffer) yang melindungi konsumsi minimum mereka. Di sisi lain, beberapa masyarakat mengidentifikasi risiko ketergantungan sebagai dampak negatif jangka panjang dari kebijakan subsidi. Pandangan ini selaras dengan kajian Agridigi UNESA (2026) yang menyatakan bahwa ketergantungan terhadap subsidi berpotensi mengurangi insentif untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.

Dampak Subsidi terhadap Dimensi Sosial Kesejahteraan

Selain dimensi ekonomi, penelitian ini juga mengidentifikasi dampak subsidi pada dimensi sosial kesejahteraan. Temuan menarik muncul dari observasi partisipan yang dilakukan selama proses distribusi LPG bersubsidi: proses pengantrian dan interaksi di titik distribusi ternyata berfungsi sebagai ruang pertemuan sosial yang secara tidak langsung memperkuat ikatan komunitas dan jaringan sosial warga. Namun di sisi lain, ketidakmerataan distribusi dan persepsi ketidakadilan dalam penentuan penerima manfaat juga dapat memicu ketegangan sosial. Fenomena ini mengonfirmasi temuan Mulyani (2021) tentang implikasi ketidakakuratan pengawasan distribusi terhadap dimensi sosial masyarakat. Dari perspektif kesejahteraan sosial yang lebih luas, Nurhayati dan Maulana (2023) mengingatkan bahwa kebijakan subsidi bahan bakar fosil memiliki konsekuensi terhadap agenda transisi energi bersih. Subsidi yang mempertahankan keterjangkauan bahan bakar fosil secara tidak langsung dapat menghambat adopsi energi terbarukan oleh masyarakat, sehingga berdampak pada kesejahteraan generasi mendatang melalui degradasi lingkungan.

Aspirasi dan Harapan Masyarakat terhadap Reformasi Kebijakan Subsidi

Secara garis besar, informan mengartikulasikan tiga tuntutan utama: (1) perbaikan sistem verifikasi data penerima manfaat agar lebih akurat dan berbasis data kependudukan (NIK), (2) peningkatan transparansi dan akuntabilitas distribusi melalui mekanisme pengawasan partisipatif; dan (3) diversifikasi modalitas penyaluran subsidi, yakni tidak hanya melalui subsidi barang tetapi juga melalui subsidi langsung berbasis rekening atau kartu. Aspirasi ini mencerminkan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sebagaimana dikemukakan oleh Susanto (2022), partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan subsidi bukan sekadar hak, melainkan juga merupakan mekanisme penting untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas program. Rekomendasi perbaikan dari arah subsidi barang (in-kind subsidy) menuju subsidi langsung berbasis data juga sejalan dengan arahan kebijakan nasional yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan RI (2022) dalam konteks pengalihan subsidi BBM.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik tiga kesimpulan utama. Pertama, masyarakat secara umum mengakui urgensi dan relevansi kebijakan subsidi sebagai instrumen perlindungan sosial-ekonomi, namun mengidentifikasi kelemahan mendasar pada aspek ketepatan sasaran, efisiensi distribusi, dan transparansi pengelolaan. Persepsi ini relatif konsisten di ketiga konteks wilayah penelitian (perkotaan, pinggiran kota, dan perdesaan), meskipun dengan nuansa dan penekanan yang berbeda. Kedua, dampak kebijakan subsidi terhadap kesejahteraan masyarakat bersifat multidimensional dan kompleks. Secara ekonomi, subsidi terbukti efektif menjaga daya beli dan melindungi kelompok rentan dari risiko kemiskinan dalam jangka pendek. Namun, potensi dampak negatif berupa ketergantungan jangka panjang dan inefisiensi alokasi anggaran negara perlu menjadi perhatian serius dalam perumusan kebijakan. Ketiga, aksesibilitas geografis merupakan faktor kontekstual yang secara signifikan mempengaruhi efektivitas subsidi, terutama bagi masyarakat perdesaan. Biaya transaksi yang harus ditanggung oleh penerima manfaat dalam proses pengambilan komoditas bersubsidi seringkali mengikis manfaat ekonomis yang dimaksudkan oleh kebijakan tersebut.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merumuskan empat rekomendasi kebijakan. Pertama, membenahan sistem data penerima manfaat secara komprehensif dengan mengintegrasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data administrasi kependudukan (NIK) hingga level by name by address. Kedua, transformasi modalitas subsidi secara bertahap dari subsidi barang menuju subsidi langsung (direct subsidy) berbasis kartu atau rekening digital yang dapat dimonitor secara real-time. Ketiga, pemberdayaan mekanisme pengawasan partisipatif masyarakat melalui pembentukan forum warga di tingkat kelurahan/desa yang secara aktif memantau distribusi dan pelaporan penyimpangan. Keempat, pengembangan infrastruktur distribusi di wilayah perdesaan dan terpencil untuk memperkecil kesenjangan aksesibilitas antara masyarakat perkotaan dan perdesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiana, N. (2022). Pengaruh Praktik Mafia Gas terhadap Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(2), 68–79.
- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). (2022). Laporan Tahunan Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg di Indonesia. Jakarta: BPH Migas.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2022. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik kemiskinan di Indonesia Maret 2023. BPS. <https://www.bps.go.id/publication/2023/07/17/696a6c5e2e2e4d7e7b7e7b7e/statistik-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- Basrowi. (2005). Pengantar Sosiologi. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Dahlan, A. (2014). Menggagas Negara Kesejahteraan. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 1–22.
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Hidayat, R. (2022). Efektivitas subsidi energi terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin: Studi kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 23(2), 145–162. <https://doi.org/10.23917/jep.v23i2.15678>
- Institut for Development of Economics and Finance (INDEF). (2023). Dampak Subsidi BBM dan LPG 3 Kg terhadap Kesejahteraan Masyarakat. INDEF Policy Brief No. 3/2023. Jakarta: INDEF.



- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Pengalihan Subsidi BBM untuk Lindungi Masyarakat Miskin dan Rentan. Jakarta: Kemenkeu RI. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2023. Direktorat Jenderal Anggaran. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/laporan/LKPP-2023>
- Lembaga Survei Indonesia (LSI). (2023). Survei nasional: Persepsi publik terhadap kebijakan subsidi BBM dan LPG pasca-penyesuaian harga. LSI Foundation. <https://lsi-foundation.org/survei-nasional-subsidi-2023>
- Mulyani, S. (2021). Persepsi Masyarakat terhadap Subsidi Energi LPG 3 Kg dan Implikasinya pada Pengawasan. *Jurnal Sosial dan Kebijakan Publik*, 8(1), 33–47.
- Munawar, H. (2019). Dampak Subsidi pada Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 10(2), 45–60.
- Nurhayati, T., & Maulana, R. (2023). Subsidi Energi dan Tantangannya dalam Mendorong Transisi Energi Bersih di Indonesia. *Jurnal Energi dan Kebijakan Lingkungan*, 5(1), 55–68.
- Pratama, A. (2021). Dampak Ketidakmerataan Distribusi LPG Subsidi terhadap Rumah Tangga Miskin. *Jurnal Energi dan Kesejahteraan Sosial*, 3(2), 45–58.
- Rahman, T. (2022). Defisit Anggaran dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Keuangan Publik Indonesia*, 12(1), 56–70.
- Rambe, A. (2004). Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga dan Tingkat Kesejahteraan: Kasus di Kecamatan Medan, Kota Sumatera Utara. Tesis. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Sari, D. P. (2021). Dampak subsidi pupuk terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) petani di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 6(1), 34–50. <https://doi.org/10.20473/jiet.v6i1.2021.34-50>
- Setiawan, R. (2022). Dinamika Kelangkaan LPG 3 Kg di Kawasan Priangan Timur: Kajian terhadap Pola Distribusi dan Faktor Penghambat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 7(1), 25–38.
- SMERU Research Institute. (2022). Mengestimasi Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Kemiskinan dan Ketimpangan: Bukti dari Pengurangan Subsidi BBM di Indonesia. Jakarta: SMERU. Diakses dari <https://smeru.or.id>
- Sudrajat, Y., & Kristian, I. (2022). Penelitian Kualitatif dalam Kehidupan Sosial dan Pemerintahan. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyowati, F., Tyas, B. H. S. N., Widati, W., & Puspitosari, C. (2024). Utopia Bantuan Pangan Non-Tunai dalam Mendorong Pemberdayaan Masyarakat. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 13(3), 214–224.
- Susanto, I. (2022). Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 14(2), 112–126.